

## Politik Identitas pada Pemilihan Wali Nagari Silantai

Arif Hardika Putra<sup>1</sup>, Irawati<sup>2</sup>, Andri Rusta<sup>3</sup>, Mhd. Fajri<sup>4</sup>

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Jl. Limau Manis, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163

\*Email: [arifhardika2612@gmail.com](mailto:arifhardika2612@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah guna memberikan informasi terkait politik identitas tidak hanya terjadi di tingkat pemilu maupun pilkada melainkan juga terjadi pada pemilihan wali nagari atau yang disingkat dengan PILWANA di Nagari Silantai Tahun 2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk membahas bentuk utama politik identitas kandidat atau elit politik. cara untuk mendapatkan kekuasaan dalam suatu posisi. Oleh karena itu, kajian mengungkap lambang suku, identitas daerah (jorong) dengan menggunakan jaringan tokoh masyarakat dan tim pemenangan yang bermemiliki kesamaan tempat lahir dan dibesarkan pada pemilihan wali nagari.

**Kata Kunci** : *Pilwana Elit Politik, Politik Identitas.*

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to explain that identity politics can color the Wali Nagar (pilwana) elections in Nagari Silantai in 2019. This research also aims to discuss the main forms of identity politics of candidates or political elites. way to gain power in a position. Therefore, the study uncovers tribal symbols, regional identity (jorong) by using a network of community leaders and supporters who come from among the sons of the region themselves in the pilwana.*

**Keywords** : *Pilwana, Political Elite, Identity Politics.*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terletak di Benua Asia dengan sistem pemerintahan berbentuk republik yang di kepele nagarai oleh seorang Presiden dan berkedudukan sebaagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan. Presiden di pilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sebgai sorang presiden juga memiliki penolong di bagian daerah dengan turunan provinsi yang di pimpin oleh seorang gubernur dan dipilih langsung pada Pemilihan Kepala daerah. Selanjutnya yaitu Kota dan Kabupaten yang dipimpi oleh Walikota dan Bupati, dipilih langsung memalui Pemilihan Kepala Derah. Dan dipecah lagi menjadi kecamatan yang dipimin oleh camat, setelah itu masih ada keluarahan, dibagi lagi menjadi desa atau di Sumatera Barat disebut dengan Nagari. Melihat pada masa rezim soeharto yang mengakibatkan adanya pelimpahan kekuasaan atau yang dikenal dengan sebutan Otonomi Derah maka pada saat itu di setujuinya Undang Undang Perda No.22 Tahun 1999, dengan tujuan daerah otonom mampu mengurus dan memiliki kemamuan mutlak terhadap daerahnya.

Desa yang lebih dikenal di Indonesia tetaapi Sumatera Barat meiliki sebutan desa dengan Nagari yang memiliki arti sebagai kumpulan masyarakat dengan landasan hukum dengan kekentalan adat istiadat masih kental. Jika dilihat dari pengertian nagari dari UU No. 6 Tahun 2014 nagari memiliki kebebasan dalam mengatur dan mengelola semua sumber daya yang ada didalmnya hal ini sama dengan kebijakn otonomu daerah. Otonomi ini bebentuk fakta dan tanpa campur tangan dan dari pihak manapun baik itu pemerintah maupun swasta. Pemerintah dan swasta juga harus bisa menjaga keutuhan dari nagari tersebut karena berda di bawah pemerintahan daerah kabupaten atau kota.

Bentuk otonomi bagi nagari atau desa adalah hak dan kewenangan untuk memilih pemimpinnya sendiri. Sebagai entitas, suatu komunitas hukum tertentu memiliki wewenang direktur yang bertindak atas entitas dari komunitas tersebut. Terkait dengan kekuasaan menguasai wilayahnya sendiri sehingga nagara berhak memilih pemimpinnya sendiri. Seperti halnya nagari dipimpin oleh seorang wali

nagari, desa dipimpin oleh seorang tertua desa.

Nagari dapat mengikuti pemilihan Nagari Wali (Pilwana) yang akan memilih calon Nagari Wali pilihan mereka. Memilih wali nagari dalam berarti memilih kelahiran pemimpin terpilih, dengan tujuan memenuhi keinginan masyarakat nagari. Maka dari itu pelaksanaan pemilihan wali nagari merupakan suatu kewajiban karena dengan adanya pesta demokrasi ini nagari dapat merasakan suatu pembaruan dan perubahan dari calon calon pemimpin yang lebih matang untuk kemajuan nagari. Tepat pada tanggal 4 September 2019 telah dilakukan pemungutan suara dalam kontestasi pilwana serentak di 40 nagari dan 435 TPS, Serta jika dilihat dari data badan pemungutan suara tercatat sejumlah 106.772 partisipan dari daerah kabupaten sijnjung yang akan memilih beberapa calon pemimpin nagari di masing-masing nagari tempat tinggal dan terdaftarnya.

Tetapi, setiap pemilu atau pesta demokrasi di nagari selalu memiliki topik pembahasan yang menarik. Salah satunya adalah persoalan politik identitas dalam pemilihan di Wali nagari silantai kecamatan sumpur kudas yaitu peneliti melihat ada calon yang didukung dari setiap suku, daerah (jorong) dan kelompok kepentingan masing masing. Bahkan dalam melakukan pemilihan wali nagari, ia juga terlibat dalam tahapan pelaksanaan pemilihan wali nagari di mana faktor identitas yang berbeda dapat disebut sebagai alat adu kekuatan ketika berhadapan dengan masalah kekerabatan, kebangsaan, budaya dan daerah, itu tidak bekerja dengan baik hari ini. Kita memiliki banyak masalah yang berbeda, dari yang pertama, pesta demokrasi sekalipun, misalnya pemilihan kepala negara, para tetua distrik atau bahkan wali Nagari dapat mengikuti kegiatan dalam pengelolaan politik identitas.

Dari kenyataan tersebut dapat di observasi adanya pemberian kekuatan pada politik identitas yang bertujuan untuk kemenangan kurisi dari wali nagari. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kelompok kepentingan yang menginginkan beberapa iming-iming dari calon wali nagari yang ia dukung. Biasanya politik identitas dengan beberapa kesaaman dari calon dan pemilih satu kampung diperuntukan untuk mengambil hati

dari masyarakat. Dapat dikatakan bahwa arti dari kesamaan itu menjadikan nya sebagai bagian dari politik identitas karena semua tim pemenangan terlibat dalam hal ini. Hal ini tergambar dari beberapa suku yang menginginkan kemenangan dari calon yang bersuku sama. Bagian dari etnis bukan suatu hal yang dianggap tidak penting bahkan di tingkat nagari atau local menjadi suatu kekuatan besar bagi calon wali nagari dalam memenangkan kursi wali nagari.

Pemilihan wali nagari di nagari silantai diwakilkan oleh lima calon dari berbagai suku dan jorong berbeda. Adanya keterwakilan dari jorong kinkin, koto tengah, koto, serta berasal dari suku Patopang, Melayu, dan Domo. Tetapi, dalam pelaksanaannya peneliti melihat masyarakat memilih calon yang memiliki ikatan primodal dengan mereka dan yang terpendang dalam masyarakat.

Dari beberapa studi pustaka yang sudah peneliti lakukan, peneliti menemukan penelitian terkait politik identitas, seperti penelitian dari Nasrudin Juhana yang dilakukan pada tahun 2018, yang mengangkat topik Politik Identitas Dan Gambaran Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Di Ibu Kota Indonesia yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada analisis dari penelitian ini menggambarkan bahwa proses pesta demokrasi disana dipengaruhi dengan adanya politik identitas yang dilakukan pasangan calon. Gambaran atau representative merupakan kunci dari tatanan kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dengan politik identitas. Tetapi peneliti juga mendeskripsikan adanya kesamaan dan perbedaan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Metode penelitian yang digunakan karena ini studi kasus jadi kualitatif.

Kedua yaitu penelitian Yoggi Alvi Hamdani (2018) dengan judul "Politik Identitas Masyarakat Multietnis Kota Sawahlunto Dalam Pilkada Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018". Menurut hasil penelitian menemukan kesamaan etnis yang dimiliki oleh ismed dan masyarakat tanah lapang, tidak serta merta menjadikan ismed dan ali mendulang suara yang banyak dikelurahan tersebut. Dikarenakan hal tersebut pelaksanaan pilkada di kelurahan Tanah Lapang tidak menimbulkan

sebuah kontelasi politik identitas dari kelompok masyarakat.

#### Kerangka Teori Politik Identitas

Politik identitas merupakan pembuatan sebuah kelompok kepentingan berdasarkan persamaan identitas, kesamaan tempat lahir dan suatu kebudayaan sebagai suatu Negara demokrasi yang didalamnya terjamin hak atas kebebasan seseorang. Politik identitas lebih merupakan sikap politik yang berfokus pada subkelompok dan mengacu pada aktivisme atau mengacu pada pengejaran status berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis, orientasi budaya, dan identitas politik lainnya.

Identitas politik juga memiliki makna sebagai bagaian dari politik yang memiliki focus pada masalah yang menyangkut dengan ketidaksamaan dari beberapa opini, seperti jenis kelamin, etnis politik, masalah fisik, dan mengakibatkan konflik atau masalah di bagian politik mengakibatkan adanya perbedaan pandangan, keyakinan dan ciri khas bahasa daerah. Pemilihan Wali Nagari

Pemilihan wali nagari disebut sebagai ajang pesta demokrasi yang sangat ditunggu di sebuah nagari. Proses pemilihan wali nagari hampir sama dengan pemilihan biasa pada umumnya. Adanya persaingan antar calon, partisipasi dari pemilih apalagi pemilih pemula. Juga adanya pemilihan secara aklamasi. Didalam pemilihan nagari paling tidak ada 3 peraturan yang harus ada yaitu, perjanjian social yang dilakukan masyarakat nagari, tata karma masyarakat, dan etika serta tahapan adat ayang ada di nagari tersebut. Suatu nagari dipimpin oleh seorang wali nagari serta ada pendukungnya seperti kepala jorong, sekretaris nagari, dan stakeholders lain yang membantu wali nagari dalam menjalankan tugasnya. Sebelum memimpin sebuah nagari wali nagari dipilih secara langsung oleh penduduk setempat dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali dengan masa jabatan yang sama dengan periode sebelumnya. Seorang yang menjadi wali nagari biasanya orang yang sudah paham akan adat budaya minang apalagi ada istiadat yang ada di nagari tersebut, hal ini bertujuan agar seorang wali nagari dapat menjadi kehormatan dan mampu mengayomi masyarakat nagarinya.

Dari proses pemilihan wali nagari menjadi hal yang sangat di haruskan di semua

nagari, dikarenakan ini merupakan pesta demokrasi rutin untuk mendapatkan pemimpin baru. Seorang kepala nagari memiliki jabatan administrator selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali.

Proses pelaksanaan Pemilihan Nagari Wali diawali dengan pembentukan Komisi Pemilihan Bamus Tingkat Nagari. Komisi Pemilihan Umum Tingkat Nagari ini menyelenggarakan proses pemilihan dari pendaftaran pemilih, pencalonan, pemungutan suara, dan pencalonan calon terpilih. Karena panitia pemilihan tingkat desa didirikan oleh Bamus. Komisi Pemilihan Umum tingkat nagari ini memberikan amanat kepada seluruh aspek yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan wali nagari kepada bamsus. Pemilihan wali nagari juga memakai azas yang sama dengan pemilihan biasanya yaitu LUBERJURDIL.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif karena terlihat bahwa pendekatan ini dapat menganalisis kenyataan masyarakat secara mendalam. Metode penelitian ini digunakan untuk mencari tahu, melihat, mendeskripsikan serta menggambarkan kondisi sebagaimana fakta aslinya. Karena penelitian kualitatif merupakan alat yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan arti dari sebuah interaksi yang ada antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Lokasi dari penelitian ini di Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Teknik pengumpulan data adalah observasi atau observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.

Tujuan dari teknik wawancara ini guna mengambil beberapa informasi dari informan karena tidak dapat dilihat secara langsung. Dokumentasi penelitian ini

berupa tulisan, artikel, arsip dan informasi lainnya yang dapat mendukung informasi yang diperoleh peneliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Macam- Macam Taktik Politik Identitas Pada Pemilihan Wali Nagari di Nagari Silantai pada pemilihan wali nagari di nagari silantai politik identitas yang terlihat terkait kabar-kabar yang berlandaskan kehidupan masa lalu yang sama dan latar belakang yang memiliki kemiripan. Ini terlihat dari kesamaan suku bangsa, jorong dan etnis supaya tidak menghilangkan tradisi yang berkembang dan menaikan nama dari suku bangsa tersebut. Inilah tujuan yang gagal dicapai oleh elit politik yang berani mencalonkan diri berdasarkan model yang tertanam dalam sumbu nagari. Seperti Daniel N. Posner (2007) ber teori bahwa elit politik memiliki dua kecenderungan untuk menggunakan masalah identitas, masing-masing calon biasanya menggunakan pendekatan yang berbeda untuk etnisitas sebelum pemilu. Tentu saja, target adalah negara yang dimaksud dan adalah kerabat.

Politisasi identitas didasarkan pada pendekatan aksi sosial untuk meraih simpati publik agar terpilih sebagai calon utama aktivisme. Mengenai bangunan yang dibangun di atas kesamaan identitas Jorong, kewarganegaraan calon dapat dijadikan salah satu alasan mengapa Wali Nagari memenangkan. Hal ini juga dapat dilihat pada aslinya, yang diketahui oleh orang-orang yang memilikinya. memiliki pengetahuan tentang kesamaan.

Seperti yang dilakukan oleh calon sabran yang melakukan beberapa kunjungan saat kampanye dengan ikut serta dan membantu kegiatan bersih-bersih sungai, ikut serta dalam pembukaan lubang larangan dan melukan ngobrol santai dengan para pemuda. Tetapi ia juga tidak lupa untuk meminta doa dan dukungan kepada ninik mamak sanak saudara baik yang dikampung maupun perantauan. Berbeda dengan sabran, calon wali nagari andridol melakukan bantuan kepada masyarakat yang terkendala biaya jika mereka sakit dan akan dibantu supaya meringankan beban mereka, serta bantuan kepada

mahasiswa dan mahasiswi yang terkendala biaya kuliah.

Ternyata, identitas itu bisa berjalan lancar disebabkan adanya kekuatan dari kelompok kepentingan yang memiliki kedekatan emosional dengan pemuka adat dapat memengaruhi hasil dari pemilihan wali nagari. Tetapi tujuan dari politik identitas sendiri supaya dapat memikat pemilih dalam bentuk membangun kedekatan teritorial asal etnis yang sama dan sebagai strategi untuk mempertegas populasi yang lebih dominan. Untuk kebebasan Rasa kesamaan-identitas ini diperkuat ketika pemilihan Wali nagari sudah beberapa kali diselenggarakan, didominasi oleh isu-isu identitas dalam bentuk kerjasama berbasis jasa elit politik. Sosialisme berkelompok di komunitas nagari sebelumnya. Dalam hal ini dilandasi belas kasih dalam manipulasi ciri-ciri yang tumbuh dalam kehidupan sosial budaya.

Dilihat dari pandangan masyarakat, mereka sudah pasti mendukung calon yang disegani masyarakat dalam berinteraksi. Dan kebetulan kebetulan yang mencalinkan anak dari kemenakan yang berasal dari jorong Koto Tengah yang sama. Maka dari itu masyarakat sepakat untuk membulatkan tekad suara untuk calon tersebut. Dari segi interaksi dengan masyarakat dapat lihat mereka akan memilih calon wali nagari yang berasal dari jorong yang sama. Terlihat kecenderungan elit politik dapat memenangkan dukungan dan berkuasa dengan berbagai cara. meskipun terlihat acak berdasarkan strategi yang digunakan, tetapi di mata penguasa, itu sangat merupakan kombinasi dalam memenjarakan massa. Ini juga merujuk pada kubu-kubu dukungan yang membentuk satu sama lain melalui sumbu identitas yang dikaitkan dengan karakter pribadi kandidat, yang kemudian mengarah ke bagian lain dari pendekatan sosial. Selain itu, masyarakat Nagari Sungai Silantai cenderung memilih elit yang memiliki program yang dapat menghasilkan pendapatan bagi pembangunan nagari.

Selain mendapatkan pemimpin yang baik yang diinginkan komunitas Nagari, juga soal pembuktian komunitas. Terkhusus pada politik identitas di nagari silantai yang semakin meningkat dalam daya tarik perpolitikan. Jika dilontarkan alasan memilih calon maka masyarakat akan menjawab memilih pemimpin yang memiliki wibawa dan pandai terhadap

masyarakat serta dari tanah kelahiran yang sama dan suku bangsa yang sama serta adanya faktor kesamaan nasib ini menjadikan mereka satu suara mendukung calon tersebut.

Bahkan ada calon yang meminta tolong kepada kelompok tani untuk mendukung dia. Dapat di analisis bahwa Beberapa aksi yang menggembirakan dari kelompok tersebut dapat mengubah argumentasi pemilih berdasarkan pendapat orang lain. namun dari sudut pandang lain, politik identitas bisa menjadi aktivitas yang wajar. Mengingat, penduduk Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan daerah yang didalamnya berbagai masyarakat yang terlahir dari suku berbeda dan etnis yang tidak sama membuat pemikirannya juga berbeda, ini yang membuat politik identitas sebagai suatu hal yang biasa di pesta demokrasi. Setiap suku pasti memiliki rasa kekompakan yang tinggi, tidak ada rasa ingin kalah tertanam dalam diri mereka.

Tetapi, jika disambungkan dengan politik identitas hal kesamaan tersebut lah yang mengahruskan mereka memilih sesuai dengan hati nuraninya. Dari penelitian ini dapat dilihat jika adanya nya politik identitas berdasarkan preferensi yang dimiliki oleh beberapa pribadi maupun kelompok. Mereka banyak memberika janji ke arah pengembangan dnagari dari segi infrastruktur supaya tidak jauh tertinggal. Ini yang mengakibatkan calon lebih mungkin untuk mencari proker yang dapat menarik simpati dari suku dan jorong yang memiliki kesamaan dengan beliau ketimbang calon yang tidak memiliki ikatan satupun.

## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan wali nagari di nagari silantai politik identitas itu ada terjadi tetapi dari segi keusukan dan jorong. Walaupun tidak secara terang terangan tetapi cara yang dilakukan oleh kelompok atau tim pemenang lebih ke symbol identitas dengan mengikuti kegiatan masyarakat seperti pembukaan lubang larangan, bersih bersih sungai, majelis ta'lim, Ta'ziah ke rumah duku, acara kepemudaan, dan mendukung partisipasi aktif Tafiz yang ada. program perumahan dan turnamen sepak bola yang ada di nagari Silantai.

Saran dari penelitian ini yaitu guna di jadikan masukan terhadap pemerintah serta masyarakat supaya lebih memperhatikan

bahaya dari politik identitas dalam panggung pesta demokrasi karena dapat menyebabkan konflik ditengah kalangan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. S. (2012). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta: Democracy Ptoject.

<https://infopublik.sijunjung.go.id/>. Diakses 17 Desember 2022

Juhana. N. 2018. Politik Indentitas dan Etnis Kebangsaan. Jurnal Ilmu Trabiyah dan Ekonomi Syariah. Vol 05.

Muthar Haboddin (2012). Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal. Malang: Jurnal Sudi Pemerintahan. Vol 3.

Nasrudin, J. (2018). Politik identitas dan representasi politik (Studi kasus pada Pilkada DKI periode 2018-2022). Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, 1(1), 34-47.

Nurdin. (2005). Politik Identitas Perempuan Aceh. Jakarta: Women Research Institue.

Salim. K (2015).Politik Identitas di Maluku Utara.Jurnal Kajian Politik dan Pembangunan Vol 11. No 2

Yoggi Alvi Hamdani. (2018). Politik Identitas Masyarkat Multietnis Kota Sawahlunto Dalam Pilkada Walikota Dan Wakil Walikota Sawahunto Tahun 2018. Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal Universitas Andalas. Vol 2. No 1 Tahun 2020.